

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

PETA KONSEP HUKUM BISNIS DI INDONESIA

SUATU PENGANTAR, BAGIAN I

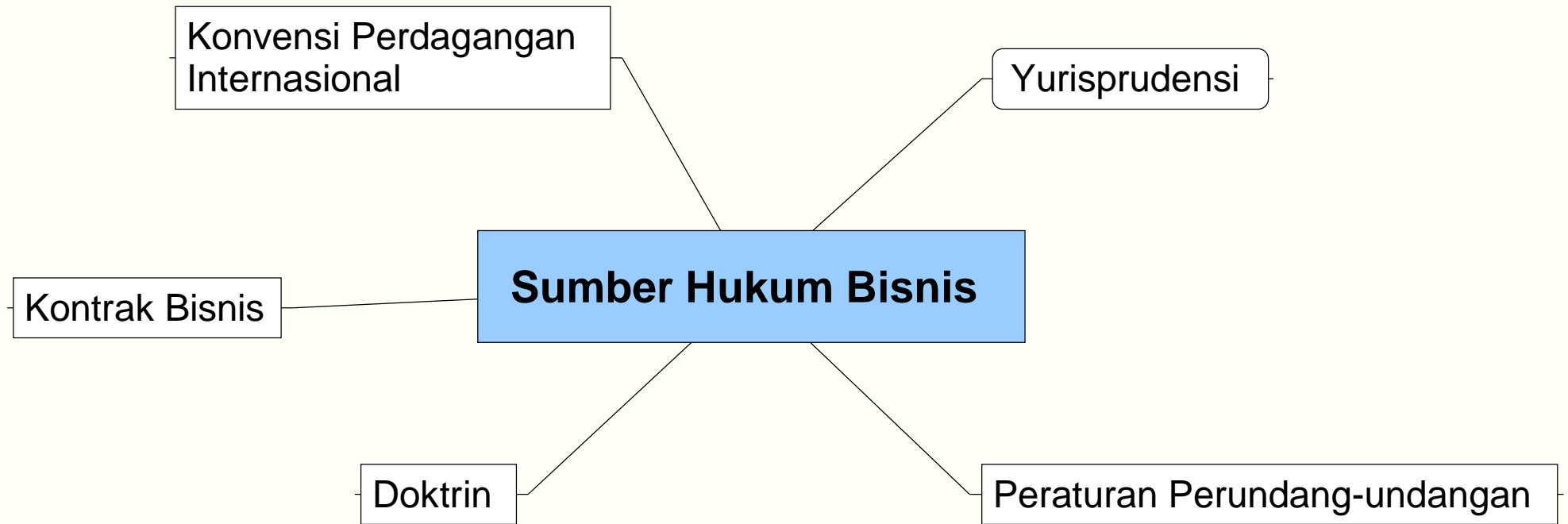
Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.

10/1/2016

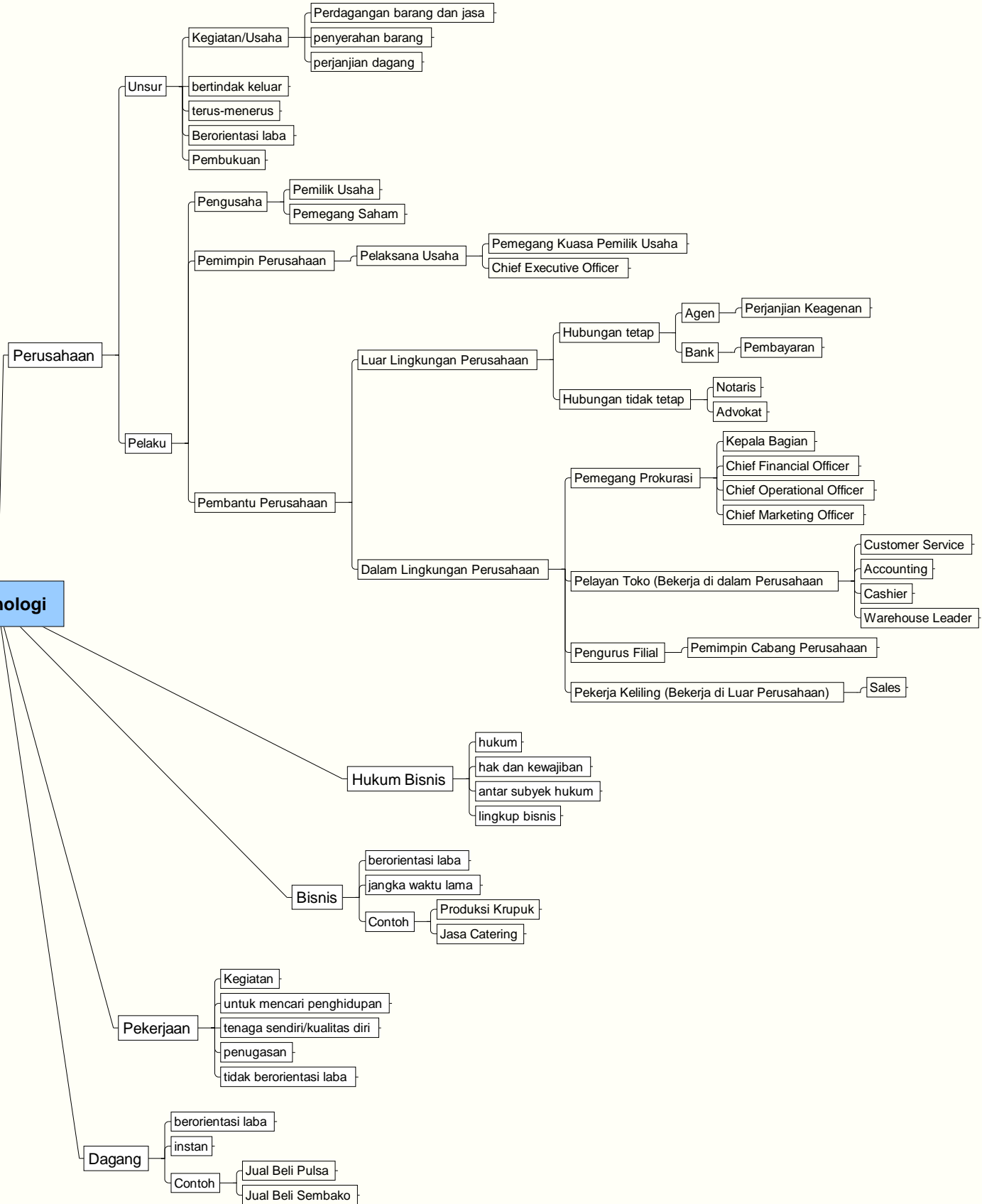
This material is delivered on business law courses at the Faculty of law of Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This material contains a collection of mind mapping regarding business law in Indonesia.

© This is an open access under CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

1. Terminologi Hukum Bisnis
2. Sumber Hukum Bisnis
3. Peraturan Perundang-undangan
4. Yurisprudensi
5. Kontrak Bisnis
6. Konvensi Perdagangan Internasional
7. Doktrin



Terminologi



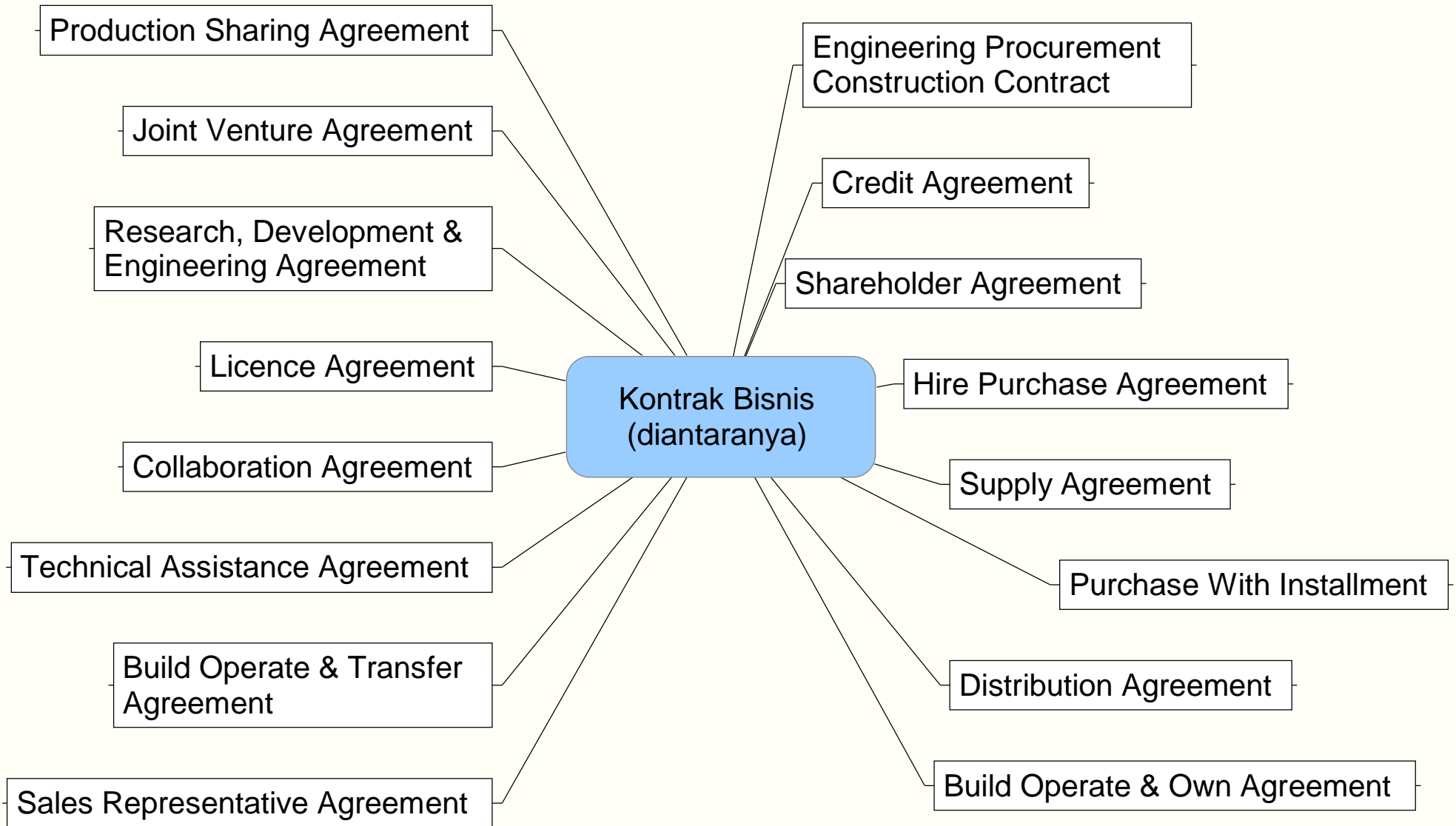
Peraturan Perundang-undangan

Hubungan KUHD dengan KUH Perdata

- Lex Specialis derogat legi generalis
- KUH Perdata/BW — Lex Generalis
- KUH Dagang/WvK — Lex Specialis

Undang-undang terbaru terkait bisnis

- Lex Specialis
- UU No.40 Tahun 2007 ttg PT
- UU No. 19 Tahun 2003 ttg BUMN
- UU No. 8 Tahun 1997 ttg Dokumen Perusahaan
- UU No. 11 Tahun 1995 ttg Cukai
- UU No. 28 Tahun 2014 ttg Hak Cipta
- UU No. 21 Tahun 2008 ttg Perbankan Syariah
- UU No. 24 Tahun 1999 ttg Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar
- UU No. 21 Tahun 2011 ttg Otoritas Jasa Keuangan
- Contoh
- UU No. 7 Tahun 1992 ttg Perbankan Sebagaimana diubah dengan U No. 10 Tahun 1998
- UU No. 3 Tahun 2011 ttg Transfer Dana
- UU No. 20 Tahun 2008 ttg Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- UU No. 7 Tahun 2011 ttg Mata Uang
- UU No.25 Tahun 2007 ttg Penanaman Modal
- UU No. 30 Tahun 2000 ttg Rahasia Dagang
- UU No. 15 Tahun 2001 ttg Merek
- UU No. 8 Tahun 1995 ttg Pasar Modal
- UU No. 8 Tahun 1997 ttg Dokumen Perusahaan



Yurisprudensi (diantaranya)

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Desember 1974 No.718 K/Sip/1974

Aset firma yang telah bubar tidak bisa beralih menjadi harta pribadi selama belum diadakanvereffening (pasal 32 KUHDagang)

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 133 K/Kr/1973 tanggal 15-11-1975

Apabila B menerbitkan cek yang disadari olehnya bahwa cek tersebut tidak akan pernah ada dananya, padahal dia telah menjanjikan kepada A bahwa cek tersebut ada dananya, maka perbuatan B dapat dikategorikan sebagai perbuatan penipuan dengan cara tipu muslihat.

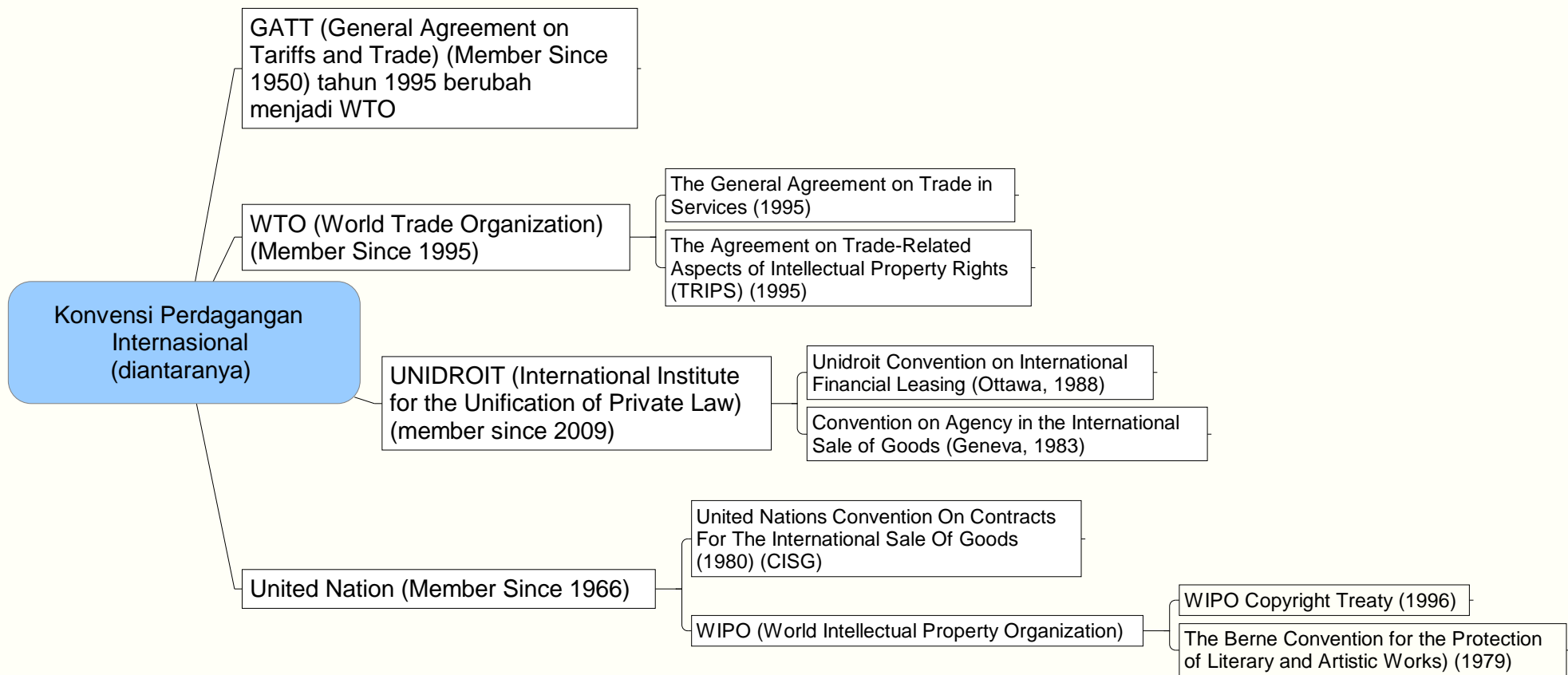
Kecuali apabila B tahu cek tersebut memang ada dananya pada saat diterbitkan dan namun pada saat tanggal jatuh tempo dananya tidak ada maka perbuatan B baru dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi murni.

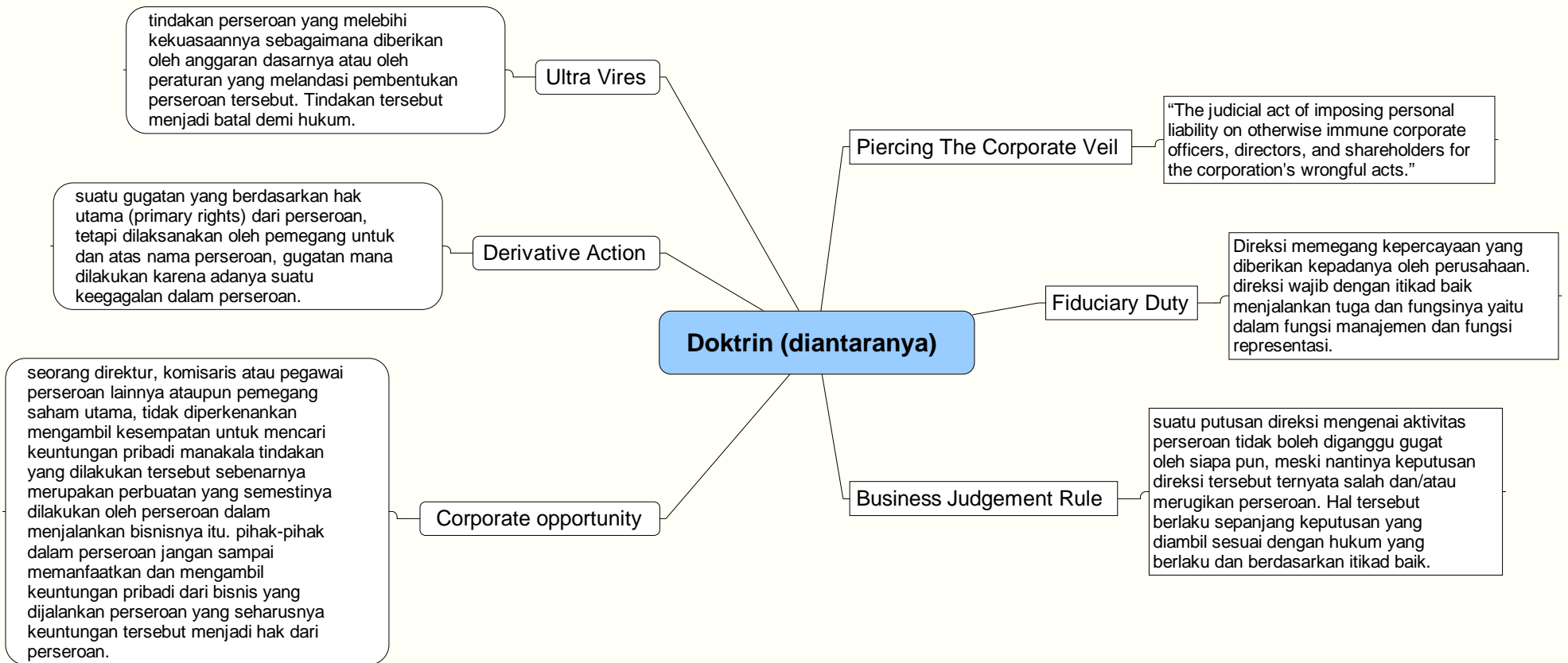
Putusan MA No. 1270 K/Pdt/1991

suatu perjanjian kerja sama sesuai dengan Pasal 1340 KUHPer, hanya mengikat kepada mereka. Selain itu, agar gugatan tidak mengandung cacat kurang pihak, semua orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai tergugat atau semua harus ikut bertindak sebagai penggugat

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 30- 12- 1957 No. 1897 K/Sip/1956.

Dalam sengeкта jual beli dimana pihak pembeli mendalihkan bahwa ia belum menerima seluruh barang yang dibelinya menurut kontrak, sedang pihak penjual membantah dengan mengemukakan bahwa ia telah menyerahkan seluruh barang yang dijual belikan, pihak pembeli harus dibebani pembuktian mengenai adanya kontrak dan pembayaran yang telah dilakukan sedang pihak penjual mengenai barang-barang yang telah diserahkan





Referensi:

1. C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, ***Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia Edisi Kedua***, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
2. Djoko Imbawani Atmadjaja, ***Hukum Dagang Indonesia***, Setara Press, Malang, 2012.
3. Rahayu Hartini, ***Hukum Komersial***, UMM Press, Malang, 2010.
1. Munir Fuady, ***Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis (Buku kedua)***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
2. Rudhi Prasetya, ***Perseroan Terbatas Teori dan Praktik***, Sinar Gafika, Jakarta, 2011.